

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Padang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah mencapai 694,96 km² (Badan Statistik Kota Padang, 2023). Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mendorong bertambahnya aktivitas masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan peningkatan volume lalu lintas di berbagai wilayah kota. Transportasi memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas dan perkembangan suatu kota, baik untuk pergerakan manusia maupun distribusi barang (Tamin, 2000). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem transportasi yang efektif dan memadai guna menekan tingkat kemacetan serta menunjang aktivitas harian masyarakat secara efisien.

Menurut Tamin (2000) transportasi adalah proses pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Perkembangan sistem transportasi biasanya berjalan seiring dengan meningkatnya dinamika aktivitas masyarakat. Pertumbuhan populasi yang pesat di wilayah perkotaan menyebabkan meningkatnya frekuensi perjalanan, yang berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan seperti kemacetan dan penurunan mutu pelayanan transportasi umum.

Salah satu faktor utama penyebab kemacetan di kawasan perkotaan adalah meningkatnya preferensi masyarakat terhadap kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum (Tamin, 2000). Kondisi ekonomi yang semakin baik mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi (Warpani, 2002) sementara penurunan penggunaan angkutan umum berkaitan erat dengan rendahnya kualitas pelayanan (Morlok, 1995). Kualitas layanan yang kurang optimal dapat terlihat dari infrastruktur yang belum memadai, waktu tempuh yang panjang, kapasitas angkut yang terbatas, tingkat kenyamanan yang rendah, jaringan trayek yang belum optimal, serta keterbatasan akses di beberapa wilayah tertentu. Dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan, terdapat tiga pihak utama yang saling berkaitan, yaitu pengguna jasa, operator, dan pemerintah sebagai regulator (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2002). Dari sisi pengguna, kriteria utama yang diharapkan meliputi kemudahan akses, waktu tunggu yang singkat, serta tarif yang terjangkau. Sementara itu, operator berfokus

pada efisiensi operasional dan keberlanjutan keuntungan. Adapun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara penyediaan layanan transportasi dan kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja trayek dan sistem pelayanan secara rutin.

Sebagai langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan pertumbuhan kota dan kemacetan, Pemerintah Kota Padang mengembangkan sistem transportasi Bus Trans Padang. Moda transportasi ini menggunakan konsep Bus Rapid Transit (BRT) dan awalnya dikelola oleh UPT Trans Padang sebelum dialihkan pada tahun 2021 ke Perumda PSM. Sistem Trans Padang dirancang memiliki enam koridor, yaitu:

1. Koridor I : Pusat Kota – Batas Kota
2. Koridor II : RTH Imam Bonjol – Bungus Teluk Kabung
3. Koridor III : RTH Imam Bonjol – Pusat Pemerintahan Aia Pacah
4. Koridor IV : Teluk Bayur – Terminal Anak Aie
5. Koridor V : Pusat Kota – Indarung
6. Koridor VI : Pusat Kota – Universitas Andalas

Koridor II Bus Trans Padang resmi beroperasi pada 12 September 2024. Layanan ini dihadirkan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi transportasi umum sekaligus mengurangi kemacetan dari Pusat Kota menuju Bungus Teluk Kabung dan sebaliknya. Agar tujuan tersebut tercapai, operasional Bus Trans Padang Koridor II perlu berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai kinerja operasional Bus Trans Padang Koridor II perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana layanan tersebut telah memenuhi standar efektivitas dan kualitas pelayanan yang diharapkan.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kinerja operasional Bus Trans Padang Koridor II.
2. Untuk menilai kinerja operasional Bus Trans Padang Koridor II apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.687 Tahun 2002.

Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi oleh Perumda PSM guna meningkatkan kinerja pengoperasian Bus Trans Padang Koridor II
2. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa mendatang

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Objek yang menjadi fokus penelitian adalah Bus Trans Padang Koridor II dengan rute perjalanan RTH Imam Bonjol – Bungus Teluk Kabung dan sebaliknya.
2. Parameter yang dianalisis meliputi faktor muat (*load factor*), waktu antara (*headway*), waktu perjalanan, waktu henti, kecepatan bus, dan waktu sirkulasi (*cycle time*).
3. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder.

